

NASKAH PUBLIKASI

**ALASAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN
*MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)***



Disusun Oleh:

Wirda Wanda Sari Bekarekar

20141060054

MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami selaku mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Nama : Wirda Wanda Sari Bekarekar

NIM : 20141060054

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, Desember 2016

Wirda Wanda Sari Bekarekar

20141060054

**ALASAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN
*MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)***

Wirda Wanda Sari Bekarekar

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: wirdabekarekar@yahoo.com

ABSTRACT

This study explains why Indonesia in cooperation with the Melanesian Spearhead Group. Members of the Melanesian Spearhead Group are the countries in the South Pacific region which has a Melanesian race. The vision of the Melanesian Spearhead Group is decolonization and freedom for all countries of Melanesia with the efforts to develop cultural identity and association, political, social and economic of Melanesians. United Liberation Movement of West Papua is listed as an observer in the Melanesian Spearhead Group. As an associate member, Indonesia tried to prevent the movement of groups of Papuan independence as part of the Melanesian Spearhead Group. Indonesia's involvement in the Melanesian Spearhead Group becomes a threat to the Papuan independence groups to secede from the Unitary Republic of Indonesia. Through the concept of foreign policy with Rational Actor model by Graham T. Allison, that there are alternatives to policy guidelines that could be taken by the government in the calculation of gains and losses over each of these alternatives. The decision-makers must always be ready to make changes or adjustments in its discretion. This concept is used by researchers to determine the involvement of Indonesia in the Melanesian Spearhead Group. The main reason why Indonesia in cooperation with the Melanesian Spearhead Group is to gain the support of the member countries of the Melanesian Spearhead Group to prevent group of Papuan independence became a permanent member to inhibit movement in liberating Papua.

Keywords: Rational Actor, Melanesian Spearhead Group, ULMWP, West Papua.

ABSTRAKSI

Penelitian ini menjelaskan mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group. Anggota dari Melanesian Spearhead Group adalah negara-negara di wilayah Pasifik Selatan yang memiliki ras Melanesia. Visi dari Melanesian Spearhead Group adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia. United Liberation Movement of West Papua terdaftar sebagai observer di Melanesian Spearhead Group. Dengan status associate member, Indonesia mencoba untuk mencegah meningkatnya pergerakan kelompok Papua merdeka sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group. Keterlibatan Indonesia di dalam Melanesian Spearhead Group menjadi ancaman bagi kelompok

Papua merdeka untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui konsep Politik Luar Negeri dengan model Aktoor Rasional oleh Graham T. Allison bahwa terdapat alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa di ambil oleh pemerintah dalam memperhitungkan untung dan rugi atas masing-masing alternatif tersebut. Para pembuat keputusan harus selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Konsep ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui keterlibatan Indonesia di dalam Melanesian Spearhead Group. Alasan utama mengapa Indonesia melakukan kerjasama dengan Melanesian Spearhead Group karena Indonesia mau mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group untuk mencegah kelompok Papua merdeka menjadi anggota tetap untuk menghambat pergerakan dalam memerdekakan Papua.

Keywords: Aktor Rasional, Melanesian Spearhead Group, ULMWP, West Papua

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasifik Selatan merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari negara-negara kepulauan dengan wilayah teritori yang amat kecil, namun sebagian besar eksistensinya berada dalam suatu kawasan yang relatif "tenang dan stabil". Negara-negara tersebut sangat rentan terhadap intervensi asing akibat kondisi geografis mereka yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Sampai saat ini proses dekolonisasi di kawasan Pasifik Selatan belum selesai secara menyeluruh. Sejak terjadinya proses dekolonisasi, muncul negara-negara kecil baru di kawasan Pasifik yang menjadikan kawasan ini semakin penting artinya.¹ Terdapat beberapa karakteristik yang menjadikannya negara-negara Pasifik Selatan berbeda dengan kawasan lain. Pertama, negara di kawasan Pasifik Selatan disebut dengan *'microstate'* karena memiliki jumlah populasi yang sedikit, serta areanya yang sempit. Kedua adalah letaknya yang berada di pulau, jauh dengan pusat dunia. Ketiga adalah negara yang berada di kawasan ini merupakan negara berkembang. Karena karakteristik ini, diperlukanlah kerjasama antar kawasan untuk menjaga eksistensinya dalam hubungan internasional.² Kestabilan politik Luar Negeri di wilayah Pasifik Selatan penting bagi Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan konsistensinya di kawasan Pasifik Selatan dalam menangani masalah-masalah regional.

Wilayah Pasifik Selatan merupakan wilayah yang cukup strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Salah satu kepentingan utama Indonesia dalam menjaga hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan adalah untuk menjaga stabilitas nasional dan regional Pasifik. Asia Pasifik dalam keterkaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, merupakan bagian dari lingkaran konsentris. Dibuatnya lingkaran konsentris salah satunya didasari oleh kepentingan antarnegara, sehingga hubungan baik antarnegara pun selalu diupayakan demi kerjasama dan pencapaian kepentingan. Indonesia telah memupuk hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN sejak awal. Selain itu, Indonesia dan negara-negara di Asia Pasifik pun

¹ Adil, Hilman. 1993. *Dinamika Perkembangan Pasifik Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan PDII-LIPI.

² Ogashiwa, Yoko. 2002. "South Pacific Forum: Survival Under External Pressure" in *New Regionalisms in the Global Political Economy*, by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond (eds). London: Routledge.

memiliki dinamika tersendiri dalam hubungan antarnegara, seperti hubungannya dengan Australia, Timor Timur, dan Papua New Guinea.

Kondisi dan posisi geografis Indonesia yang sangat prospektif di Kawasan Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara yang berada diantara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Hindia. Selain itu dari sisi politik Indonesia memiliki peranan penting di Asia Pasifik, mengingat lingkaran konsentris pertama Politik Luar Negeri Indonesia adalah ASEAN. Strategi Indonesia yang lain untuk berperan dalam pengembangan kawasan Pasifik Selatan adalah melalui bantuan kapasitas. Kawasan Pasifik Selatan sendiri didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Melanesia merupakan gugus kepulauan yang memanjang dari Maluku lalu ke timur sampai Pasifik bagian barat, serta utara dan timur laut Australia. Indonesia memiliki 3 wilayah yang memiliki rumpun Melanesia yaitu wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya semangat solidaritas etnis yang tinggi dari beberapa negara ras Melanesia, kemudian terbentuklah sebuah organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*) yaitu *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Kawasan kepulauan pasifik memiliki peranan penting bagi kedaulatan Indonesia terutama mengenai permasalahan Papua Barat. Rasa solidaritas sebagai sesama bangsa Melanesia membuat gerakan-gerakan yang menginginkan Papua Barat untuk merdeka mendapat sambutan hangat di negara-negara Melanesia. Negara-negara tersebut tergabung kedalam *Melanesian Spearhead Group*. Keberadaan negara-negara tersebut penting bagi Indonesia mengingat kasus kemerdekaan Papua Barat merupakan hal yang sensitif terutama dari dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi manusia. Hubungan dengan negara-negara pasifik jika tidak dikelola dengan baik di khawatirkan oleh pemerintah Indonesia bahwa akan mengakibatkan mereka berpihak pada gerakan Papua Merdeka. Suara negara pasifik dalam PBB juga cukup didengar, sehingga menyulitkan posisi Indonesia di dunia Internasional. Meskipun pemerintah negara anggota *Melanesian Spearhead Group* mengakui integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional

menjadi bagian dari NKRI,³ namun kenyataannya *Melanesian Spearhead Group* melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

Terlihat menarik mengingat sudah lama Indonesia memprioritaskan ASEAN pada politik luar negerinya. Namun, penduduk Indonesia yang sangat beragam mendorong kerjasama dengan kawasan lain. Penduduk Indonesia tidak hanya merepresentasikan ras Asia khususnya Melayu tetapi juga Melanesia. Hubungan antara pemerintah pusat dengan ras Melanesia di wilayah Papua Barat dapat dikatakan kurang harmonis yang terlihat dari adanya gerakan separatisme yang dilakukan sebagian kelompok tersebut di wilayah Papua Barat.

Pada KTT *Melanesian Spearhead Group* ke-18 di Fiji, Indonesia diterima dan diberikan status sebagai *observer*. Pada forum ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan mengenai kondisi Papua serta mempersilakan perwakilan *Melanesian Spearhead Group* melakukan kunjungan ke Papua untuk mendengar langsung terkait kebijakan pembangunan ekonomi serta aspek keamanan di Papua dan melihat kondisi di Papua secara langsung.⁴ Hal tersebut dilakukan terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Keterlibatan Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group*, berdampak pada munculnya perlawanan dari gerakan separatis di Papua yang terancam dipersulit untuk memerdekakan Papua. Gerakan separatisme yang tergabung dalam *United Liberation Movement of West Papua* (ULMWP) berkembang di kawasan Pasifik Selatan menggalang dukungan dari negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Pada organisasi regional *Melanesian Spearhead Group* ini, *United Liberation Movement of West Papua* (ULMWP) juga diterima sebagai *observer* dengan catatan sebagai wakil penduduk Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia dan bukan sebagai entitas negara tersendiri. Hal ini mendatangkan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia yang saat ini berstatus *associate member*. ULMWP sendiri merupakan organisasi politik yang sama dengan FLNKS dalam hal sebagai gerakan pro-kemerdekaan dari negara asal. Dengan demikian, fokus politik luar negeri Indonesia dewasa ini mengindikasikan adanya kesadaran bahwa Indonesia merasa perlu untuk

³ Bhakti, Ikrar Nusa. 2006. *Merajut Jaring-Jaring Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Jakarta: LIPI

⁴ SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua. <http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk-jelaskan-kondisi-papua/1938483.htm> di akses pada 10 Mei 2016, pukul 20.30 WIB

membangun kedekatan dengan negara-negara di kawasan Melanesia untuk membendung usaha gerakan separatisme ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- Mengapa Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan rasionalitas Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

D. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

Studi Pustaka digunakan untuk mendukung penelitian sebagai bahan acuan sekaligus untuk menambah kajian mengenai keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*. Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dapat dijadikan acuan dengan tujuan mengembangkan pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Sejauh ini, telah terdapat beberapa publikasi yang membahas mengenai keterlibatan Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group*. Beberapa studi yang membahas mengenai rasionalitas kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terpapar dalam uraian berikut.

Menurut Dame Meg Taylor dalam tulisannya "*Pacific Regionalism: Understanding the Pacific's regional architecture*" menguraikan tentang beberapa forum regional di wilayah Pasifik. Salah satunya adalah *Melanesian Spearhead Group* (MSG), terdiri dari Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu dan New Caledonia, yang telah menjadi pemecah politik yang efektif bagi permasalahan regional. *Melanesian Spearhead Group* telah menerapkan perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif bagi barang dan jasa, termasuk peningkatan keterampilan para tenaga kerja dan mencapai tingkat integrasi ekonomi yang belum ditemukan di wilayah pasifik secara menyeluruh. Tahun 2003 *Pacific Plan Review* menemukan bahwa sebagian besar pemimpin mengartikan kemunculan *Melanesian Spearhead Group* lebih bersifat melengkapi dari pada bersaing. *Melanesian Spearhead Group* diartikan sebagai cerminan keistimewaan dari ras Melanesia, Polinesia, dan Micronesia, serta sebagai

perwujudan nyata dari *Melanesia Way*. *Melanesian Spearhead Group* menghadapi beberapa tantangan terkait keadaan buruk *West Papua*, di bawah kekuasaan Indonesia, dengan memberikan status sebagai *observer*.

Gregory Poling melalui tulisannya yang berjudul “*The Upside of Melanesian Leaders’ West Papua Compromise*” menguraikan tentang perjuangan *Melanesian Spearhead Group* terkait status keanggotaan *West Papua* yang masi diperdebatkan. Keinginan Indonesia menjalin hubungan dengan *Melanesian Spearhead Group* terlihat sebagai suatu cara untuk menghentikan aspirasi Papua tergabung dalam forum yang sama. Dengan diberikannya status *observer* kepada *West Papua* menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia jika status tersebut adalah langkah awal bagi *West Papua* untuk menjadi anggota tetap walaupun pemimpin *Melanesian Spearhead Group* menyatakan bahwa *West Papua* hanya akan mewakili masyarakat Papua yang berada di luar wilayah Papua. Indonesia telah mengajukan petisi keras untuk mencegah kelompok separatis Papua diterima sebagai anggota penuh *Melanesian Spearhead Group*.

Ronald May dalam “*The Melanesian Spearhead Group: testing Pacific island solidarity*” menguraikan tentang hubungan kerasama yang dilakukan antara anggota-anggota wilayah Pasifik yang tergabung ke dalam forum *Melanesian Spearhead Group*. Dikatakan bahwa awal pembentukan *Melanesian Spearhead Group* adalah untuk melakukan kerjasama perekonomian antara negara-negara anggota sehingga dapat membentuk wilayah sub-regional perdagangan bebas di Pasifik, akan tetapi pada kenyataannya *Melanesian Spearhead Group* dibentuk bukan dengan tujuan perekonomian tetapi lebih kepada politik. *Melanesian Spearhead Group* memiliki solidaritas dan tekad yang kuat untuk menyuarakan ras Melanesia di wilayah Pasifik, baik kepada *member countries* maupun *non-member countries*. Selain Perjanjian Perdagangan, sejumlah proyek dan kegiatan yang berlangsung di dalam sekretariat dan di bawah arahan kepemimpinan politik. Beberapa kegiatan ekonomi, termasuk pengembangan skema gerakan keterampilan untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja antar negara anggota.

Solomon Deli dalam “*The influencing factors of Melanesian Spearhead Group’s stand of West Papua Political Freedom*”, menguraikan tentang motif pengaruh Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* serta kepentingan dan dukungan *Melanesian Spearhead Group* untuk kebebasan politik Papua Barat. Dengan diberikannya bantuan finansial dan teknis secara langsung yang selama ini menjadi incaran anggota-anggota *Melanesian Spearhead Group*, menjadi sambutan hangat bagi

Indonesia. Salah satu alasan bagi Kepulauan Solomon, Fiji, dan Papua New Guinea membentuk hubungan lebih dekat dengan Indonesia adalah untuk fokus dan berdiskusi mengenai Papua Barat. Indonesia melihat hal tersebut sebagai jawaban atas kepentingan bersama dengan memberikan bantuan finansial untuk membungkam dukungan mereka kepada Papua Merdeka. *Melanesian Spearhead Group* memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa selama mengakui aspirasi Vanuatu untuk mendukung kasus Papua Barat, *Melanesian Spearhead Group* juga bisa mencari strategi baru untuk melakukan perdebatan dengan Indonesia tanpa harus mempersulit keadaan. Selama Indonesia mempertahankan pengaruh yang kuat terhadap politik regional, maka kesempatan untuk menerima WPNCL perihal status keanggotaan *Melanesian Spearhead Group* masih belum bisa dipastikan.

Dari uraian mengenai literatur review diatas, maka peneliti lebih sepakat dengan pendapat dari Gregory Poling mengenai keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* terlihat sebagai suatu cara untuk menghentikan aspirasi kelompok Papua Merdeka yang tergabung dalam forum yang sama. Jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka perbedaannya adalah peneliti akan menganalisis alasan Indonesia terlibat di dalam *Melanesian Spearhead Group* dari sudut pandang yang berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tesis ini akan mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Sebab, terlihat jelas bahwa wajah Indonesia sangat terarah ke wilayah barat sehingga minim sekali untuk menoleh ke wilayah timur. Hal tersebut akan penulis garis bawahi dengan mengubah pandangan dari barat ke timur menjadi dari timur ke barat, serta menjadikan Pasifik Selatan sebagai halaman depan bagi Indonesia.

Kedua, tesis ini bertujuan menggunakan karakter kebijakan baru Joko Widodo yaitu dalam peningkatan partisipasi di level Internasional / regional. Pembahasan dalam tesis ini bertujuan mendiskusikan hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan penerapan kebijakan di masa depan. Dalam hal ini penulis melihat dari sisi Indonesia yang melibatkan diri di dalam forum Pasifik Selatan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam masa pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini bertujuan meyoroti keterkaitan antara Indonesia, *Melanesian Spearhead Group*, dan kelompok separatis yang ingin memerdekakan Papua. Peneliti menggunakan Aktor Rasional untuk melihat proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam forum sub-regional *Melanesian Spearhead Group*. Dalam konteks ini tentunya kebijakan

politik luar negeri Indonesia sangat berpengaruh terhadap strategi Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Konsep Politik Luar Negeri

Kepentingan nasional merupakan landasan terpenting dalam Politik Luar Negeri suatu negara. Dalam hal ini kepentingan nasional adalah hal vital dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Pada umumnya kepentingan nasional selalu berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan, dan kekuasaan.⁵ Politik luar negeri secara umum merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam pencaturan dunia internasional.⁶ Sehingga bisa dikatakan Politik Luar Negeri juga sebagai penentu arah bahkan menentukan posisi suatu negara dalam dunia internasional.

Politik luar negeri merupakan refleksi dari realitas yang terjadi di dalam negeri serta juga dipengaruhi oleh situasi internasional. Hal ini diperkuat oleh Rosenau yang menjelaskan pengkajian kebijakan luar negeri suatu negara akan menghadapi situasi yang kompleks meliputi kebutuhan eksternal dan kehidupan internal.⁷ Berarti kedua kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Adanya faktor internal merupakan tempat pertautan kepentingan nasional, sedangkan eksternal merupakan tempat dimana negara dapat mengartikulasikan kepentingan nasional sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai.

Politik luar negeri Indonesia memiliki landasan idiil yaitu dasar negara RI yang berpedoman pada Pancasila, sedangkan landasan konstitusional Politik Luar Negeri RI adalah UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Sebagai Landasan operasional Politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja penjelasan corak *bebas* dan *aktif* dari politik luar negeri, sebagai berikut:⁸

“Bebas: dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif: berarti bahwa

⁵ Budiono Kusumohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta

⁶ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

⁷ *Ibid*

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1983, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini (Kumpulan karangan dan Pidato)*, Bandung: Penerbit Alumni

di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasip-reaktip atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif”

Sehingga pendapat Rosenau akan kebijakan luar negeri yang diliputi kebutuhan eksternal dan internal dapat tergambar melalui Politik Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif, bahwa untuk merumuskan prinsip tersebut juga diwarnai akan dinamika politik internasional.

Presiden Joko Widodo dalam menerapkan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif adalah menginterpretasikan makna “Bebas” didasarkan pada kemandirian, dan kedaulatan dari Indonesia dalam menentukan kebijakan dan arah politik itu sendiri.⁹ Pemaknaan “Aktif” dalam Politik Luar Negeri Presiden Joko Widodo adalah dimaknai dengan mewujudkan misi yaitu terselip makna *gotong royong* yang dalam hal ini dimaknai dengan menciptakan kemandirian kedaulatan tidak bisa dilakukan sendiri namun dapat merangkul berbagai kekuatan dan terlibat aktif dalam berbagai momentum-momentum kerjasama. Kebijakan pengambilan keputusan Politik Luar Negeri mengacu pada pilihan individu, kelompok, dan koalisi yang mempengaruhi tindakan suatu bangsa di kancah internasional. Keputusan kebijakan Luar Negeri biasanya memiliki resiko yang tinggi dan ketidakpastian yang sangat besar.¹⁰

Politik luar negeri adalah seperangkat maksud, tatacara, dan tujuan, yang diformulasikan oleh orang-orang dalam posisi resmi atau otoritatif, yang ditujukan terhadap sejumlah aktor ataupun kondisi di lingkungan luar wilayah kekuasaan suatu negara, yang bertujuan mempengaruhi target tertentu dengan cara yang diinginkan oleh para pembuat keputusan. Terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri: faktor internasional dan faktor domestik. Kedua faktor ini digunakan sebagai basis pertimbangan oleh para pembuat kebijakan politik luar negeri, yang melakukan proses pembuatan keputusan. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa penyesuaian, program, masalah/tujuan, dan orientasi internasional.

Dalam memaparkan analisa terhadap kebijakan luar negeri, terdapat tiga teori dasar mengenai studi analisis kebijakan luar negeri yakni *realism*, *liberalism*, dan *constructivism*. Realisme melihat setiap kebijakan luar negeri suatu negara didasari pada konsep *groupism*, *egoism* dan *power centrism*. Pada konsep *groupism* yang berarti

⁹ ibid

¹⁰ Renshon, J. & Renshon, S. 2008. *The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making, Political Psychology*, Alex Mintz & Karl DeRouden Jr.2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making* hal 3

bahwa negara membutuhkan warga masyarakat satu sama lain guna memenuhi kebutuhan bersama sehingga negara merupakan kumpulan kesatuan warga masyarakat itu sendiri. Kemudian, yang kedua yaitu *Egoism* yang berarti persaingan antar negara akan dikejar oleh masing-masing pihak tanpa mempedulikan pihak lain karena kondisi anarki dan perang merupakan hal yang tidak dapat terelakkan. Dan *power centrism* yang berarti adanya penggunaan kekuatan negara yang krusial kaitannya dengan kepentingan negara.¹¹ Dalam teori realisme hanya sekelompok negara yang berperan didalamnya yaitu negara yang memiliki power terbesar yang memanfaatkan *power* terkait adanya konflik.

Selain itu, David Singer menggunakan pendekatan berdasarkan tingkatan ruang lingkup dalam analisa yang disebut sebagai *Level of Analysis* (LoA), mengatakan bahwa ruang lingkup dibagi menjadi dua yakni tingkat domestik dan internasional. Tingkatan internasional atau disebut sebagai level sistemik berfokus kepada konsep tingkah laku dan sifat dari aktor negara itu sendiri yang mana dipengaruhi oleh kondisi sistem internasional yang ada pada masa tersebut.¹² Tingkatan kedua adalah tingkat domestik atau sub-sistem. Tindakan negara ketika dihadapi oleh sebuah fenomena pada domestik dalam negerinya mempengaruhi politik luar negeri negaranya.¹³ Nilai historis negara, tradisi agama atau sosial, atau sifat ekonomi dan geografis negara menjadi panduan negara dalam menerapkan dan menciptakan kebijakan luar negerinya. Pada dasarnya *Level of Analysis* mencoba menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi aktor negara dalam bertindak menggunakan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi sebuah fenomena berasal dari faktor-faktor yang ada.

Salah satu perspektif dalam ilmu Hubungan Internasional yang mengalami banyak perkembangan adalah Realisme. Perspektif realis banyak membahas tentang perang dan keamanan yang berkaitan dengan militer dan power. Realisme berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa "*man is evil*". Aktor dalam perspektif realisme adalah negara, sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu (*self-interested*) dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Strategi pendekatan yang digunakan oleh aktor negara dinamakan kebijakan luar negeri yang mana menentukan arah interaksi antar aktor.

¹¹ Wohlforth, William C., 2012. *Realism and Foreign policy*" dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, Foreign Policy, Theories, Actors, Cases. Oxford

¹² Singer, J. David, 1961. "*The Level-of-Analysis Problem in International Relations*", *World Politics*, 14(1), the International System: Theoretical Essays

¹³ Ibid

Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Oleh karena itu, *power* adalah konsep kunci dalam hal ini. Dasar Normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis.

Power menurut Morgenthau dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: mengontrol pikiran dan tindakan, kemampuan mendapatkan apa yang diinginkan, dan untuk mendapatkan *power* tidak hanya dilakukan dengan senjata / ancaman, tetapi dengan pengaruh diplomasi dan otoritas. Penulis melihat bahwa kebijakan luar negeri memerlukan alat dalam menganalisisnya melalui teori. Kebijakan luar negeri juga dapat dibatasi dengan mempersempit analisa yang ada melalui fenomena-fenomena hubungan internasional yang berkembang, yang kemudian dapat menggambarkan perilaku negara dengan menganalisa kebijakan luar negeri yang ada. *Power* pada dasarnya berarti kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dalam pencapaian ini, dapat dilakukan dengan *hard power* atau *soft power*. *Hard power* lebih bersifat memaksa dan keras, contohnya dengan menggunakan kekuatan militer. *Soft power* bukan berarti tanpa kekuatan, namun *soft power* menggunakan pendekatan yang berbeda. *Soft power* lebih ditujukan pada perubahan cara pandang, ideologi, dan sebagainya. Dalam tesis ini, penulis memilih untuk menggunakan *soft power* untuk melihat pengaruh yang diberikan Indonesia di wilayah Pasifik Selatan, khususnya di dalam *Melanesian Spearhead Group*.

b. Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Menurut Graham T. Allison, untuk menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri antara lain dapat digunakan *rational policy model*. Proses kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. Allison membuat kajian politik luar negeri yang revolusioner karena dianggap menantang asumsi rasionalisme dalam politik luar negeri yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi dan sedikit banyak dianut juga oleh realisme dalam

menjelaskan politik luar negeri suatu negara.¹⁴ Dalam asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Bagi Allison, analisis rasional yang disebut ‘Model Aktor Rasional’ mendasarkan diri pada imajinasi karena tidak mendasarkan analisis pada fakta empirik yang sering di sebut melanggar prinsip hukum *falsifiability*.

Dalam perspektif “*Decision Making Process*”, Graham T Allison dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*, yang diterbitkan Boston: Little, Brown and Company tahun 1971, mengajukan tiga paradigma yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB), yang akan diuraikan secara singkat berikut ini: Model Aktor Rasional (*Rational Actor*), model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Model Proses Organisasi (*the Organizational Process*), model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi. Model Politik Birokratik (*Bureaucratic/Governmental Politics*), model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar *stakeholders* terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa

¹⁴ Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

para pembuat keputusan melakukan alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Asumsi dasar perspektif model aktor rasional yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global.¹⁵ Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menjabarkan keuntungan dan kerugian mengenai keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*. Ada beberapa hal yang penulis lihat adalah sebagai keuntungan Indonesia bergabung ke dalam forum sub-regional *Melanesian Spearhead Group*, yaitu: Indonesia merupakan negara dengan jumlah ras Melanesia terbanyak di bandingkan dengan negara-negara yang terletak di wilayah Pasifik Selatan; secara geografis Indonesia merupakan tertangga dekat dengan negara-negara Melanesia, sehingga sangat mungkin bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi; dan tingkat ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Pasifik Selatan sangat jauh di bawah Indonesia, sehingga merupakan salah satu peluang bagi Indonesia untuk memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian kerugian timbul dengan bergabungnya Indonesia ke dalam *Melanesian Spearhead Group* adalah munculnya perlawanan dari kelompok separatis Papua Merdeka dengan mengangkat isu-isu yang terjadi di wilayah Papua.

Berdasarkan keuntungan dan kerugian yang telah di jabarkan di atas, penulis melihat lebih banyak keuntungan yang akan di peroleh oleh Indonesia dengan bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group*. Hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia dalam mengambil keputusan untuk bergabung kedalam forum tersebut. Aktor utama yaitu negara harus dapat mengambil keputusan secara rasional dengan menimbang untung dan rugi yang akan di peroleh setelah keputusan di ambil.

Keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dan tujuan strategis dalam menyusun kebijakan luar negeri. Proses pembuatan kebijakan luar negeri dilakukan oleh aktor yang mana masing-masing berperan sebagai pemain. Hubungan antar aktor secara umum digambarkan dalam proses tarik ulur satu sama lain

¹⁵ Bruce Russett dan Harvey Starr. 1998. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co.

(*pulling and hauling*). Kebijakan luar negeri dipahami sebagai *political outcomes*. Menurut Allison *outcomes* bukanlah penyelesaian yang dipilih oleh para aktor tetapi merupakan hasil dari kompromi, koalisi dan kompetisi antar aktor.¹⁶ Menganalisa *foreign policy* sebagai bentuk proses rasionalitas atau disebut *foreign policy making as rational process* menurut Allison bahwa *Rational decision making model* terbentuk dari aktor kesatuan (*unitary actor*) yang menjalankan peran sebagai rasional aktor dalam pengambilan sebuah keputusan. Kebijakan luar negeri tersebut menjadi sebuah langkah dalam menangani konflik maupun permasalahan yang dihadapi negara. Seperti dikatakan dalam kaitannya mengenai *Rational Decision-Making Model* adalah bahwasanya sebagai “*foreign policy as results from an intellectual process where the actors choose what is the best for the country and select*”. Maka dalam rasionalitas pengambilan kebijakan sebagai tujuan menjalankan kebijakan yang terbaik bagi negara.

Politik Luar Negeri sebagai akibat tindakan-tindakan yang di pilih oleh aktor rasional untuk mencapai target dari tujuan-tujuan yang di tetapkan oleh suatu negara. Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri dari model ini disebut sebagai suatu proses intelektual. Aktor-aktor rasional berusaha untuk membuat kebijakan luar negeri yang dapat memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional. Dalam hal ini negara dilihat sebagai entitas monolitik. Allison menekankan bahwa kelemahan dari pandangan tersebut adalah negara satu dengan negara lainnya tidak memiliki sifat yang homogen sehingga aktor-aktor rasional tersebut tidak dapat menjelaskan politik luar negeri maupun mekanisme internal dalam perumusannya dengan baik. Keterkaitan antara model Aktor Rasional dan teori realis dapat dilihat dengan sangat jelas, dimana aktor utamanya adalah negara. Dalam proses pembuatan keputusan, aktor memiliki peran penting untuk mempengaruhi aktor lainnya dalam mencapai tujuan.

E. HIPOTESA

Dengan demikian, Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group* karena adanya peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia melalui *soft power* sebagai motor penggerak di Kawasan Pasifik Selatan. Sehingga mempermudah Indonesia untuk merubah dukungan negara-negara di kawasan tersebut, khususnya anggota *Melanesian Spearhead Group*, mengenai kedaulatan Indonesia terhadap Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶ *ibid*

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksplanatif. Metode eksplanatif bertujuan untuk menerangkan dan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Penulis menggunakan metode eksplanasi untuk menjelaskan tentang kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara memposisikan diri di panggung internasional. Beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan keterlibatan Indonesia di dalam forum pasifik adalah yang pertama faktor sosial budaya, hal ini terlihat dari persamaan ras Melanesia yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Pasifik. Yang kedua adalah faktor geografi, dimana selain ASEAN, Indonesia juga memiliki tetangga yang serupa yang terletak di bagian timur Indonesia. Kemudian faktor ekonomi dan politik, dimana Indonesia saat ini sedang menebar bibit untuk dapat di ambil hasilnya dikemudian hari. Jika dilihat dari sisi ekonomi, tingkat ekonomi Indonesia jelas lebih tinggi dari pada negara-negara anggota lainnya. Oleh sebab itu, saat ini Indonesia masih lebih banyak memberi daripada menerima. Berbicara mengenai politik, Indonesia ingin mejadi negara berpengaruh di wilayah Pasifik Selatan, seperti Indonesia yang telah berpengaruh di Asia Tenggara. Terkait isu-isu yang terjadi di Papua maka Indonesia merasa untuk meredam isu-isu yang saat ini telah menjadi internasional. Dalam perkembangannya dari masa ke masa, faktor internal yang terjadi masih dengan hal yang sama. Penulis melihat bahwa permasalahan yang sering disuarakan datang dari permasalahan mengenai kelompok separatis Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI dengan meyuarkan isu-isu yang telah menjadi isu internasional. Kelompok ini datang dari dalam wilayah Indonesia, dimana mereka merasa tidak adil dengan perlakuan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat setempat.

Dengan bergabungnya Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*, kebijakan pemerintah terkait kerjasama luar negeri di dalam forum internasional dan sub-regional,

dapat kita lihat sesuai dengan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas bahwa mengenai kebijakan politik luar negeri oleh Rosenau yang didasari oleh faktor internal dan eksternal, dimana dengan bergabungnya Indonesia di dalam forum Pasifik Selatan ini, pemerintah melalui presiden Joko Widodo melihat beberapa faktor yang bisa dikembangkan dan juga menjadi keuntungan bagi Indonesia di kemudian hari. Keuntungan dengan bergabungnya Indonesia ini terutama pada kerja sama dibidang ekonomi mengingat nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* sampai saat ini cukup besar. Artinya bahwa keterlibatan Indonesia menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group* dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di negara-negara pasifik. Selain itu, keberadaan Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* ini juga akan menguntungkan dalam membangun hubungan diplomasi, terutama terkait isu Papua Merdeka. Pemerintah akan lebih mudah memberikan pemahaman bahwa Indonesia sangat peduli dengan masyarakat Melanesia, terutama yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemahaman ini tentu dilakukan dalam bentuk pembentukan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita pun telah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia di Papua dalam keadaan baik-baik saja, masyarakat menjalankan aktivitasnya secara normal dan kondusif. Roda pemerintahan dan intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun berjalan lancar. Sehingga ketika ada aksi masyarakat yang mengatasnamakan rakyat Papua ingin merdeka tentu perlu dipertanyakan, apakah benar itu sesuai dengan keinginan masyarakat disana. Untuk itu, tergabungnya Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di dunia terutama rakyat Melanesian bahwa Indonesia masih sangat mampu mengelola konflik rumah tangganya sendiri.

Bergabungnya Indonesia dengan *Melanesian Spearhead Group* bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi keikutsertaan Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju *look east policy*. Kehadiran Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* merupakan bagian dari upaya untuk mendekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog *Melanesian Spearhead Group* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap

Indonesia dalam forum internasional. Ada beberapa strategi yang digunakan Indonesia untuk melakukan pendekatan di wilayah Pasifik Selatan, yaitu: *look east policy*; *prosper thy neighbour*; dan *regional power policy*.

Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Penulis menggunakan *Actor Rational* dengan pendekatan realisme untuk melihat kebijakan politik luar negeri Indonesia yang kemudain akan menunjukkan alasan tergabungnya Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*. Penulis melihat bahwa realis juga memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada di antara aktor negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Oleh karena itu, *power* adalah konsep kunci dalam hal ini. Dasar Normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis.

Realisme merupakan teori yang menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Setiap aktivitas interaksi aktor Hubungan Internasional harus dikaitkan dengan aktor negara. Sama halnya dengan aktor rasional yang menjadikan Negara sebagai aktor utama dalam pengambil keputusan. Dalam hal ini, penulis melihat Indonesia sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. Keputusan Indonesia akhirnya memutuskan untuk bergabung kedalam forum Pasifik Selatan karena Indonesia merasa percaya diri dengan power yang dimiliki sebagai Negara yang berpengaruh di wilayah Asia Tenggara. Melihat hal tersebut, Indonesia mulai memberikan perhatian lebih kepada wilayah Pasifik Selatan. Di bandingkan dengan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan, Indonesia memiliki keunggulan dari segi ekonomi, luas Negara, dan pengaruh politik yang kuat. Untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpengaruh di wilayah Pasifik Selatan, Indonesia masuk dengan cara yang *smooth*. Dalam hal ini Indonesia menggunakan *soft power* dengan cara diplomasi.

Dengan mengedepankan identitas sebagai Negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional merupakan salah satu tujuan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Joko Widodo. Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang eksis dan berkontribusi bagi dunia Internasional yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Arah kebijakan luar negeri Indonesia pada era Joko Widodo saat ini adalah diplomasi ekonomi dan pilar ekonomi menjadi salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia. Kapasitas diplomasi Indonesia dalam hal ekonomi ini sangat membantu Indonesia untuk berkiperah di wilayah Pasifik Selatan. Penulis mengatakan demikian karena diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk menopang kemandirian ekonomi nasional dan juga untuk secara internasional. Dikatakan secara internasional karena dengan tingginya tingkat ekonomi Indonesia di bandingkan dengan Negara-negara di kawasan pasifik Selatan, maka Indonesia bias memanfaatkan hal ini untuk memberikan bantuan kepada mereka.

Terkait isu-isu yang sering disuarakan oleh kelompok separatis kemerdekaan Papua, hal ini mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas diplomasi Indonesia. Peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia di katakana cukup berani dengan melakukan sesuatu yang berbeda yang akan menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki wibawa dikancah internasional. Kepercayaan diri Indonesia yang tinggi terlihat pada siding PBB di *New York* pada September 2016 lalu, dimana Nara Rakhmatia yang merupakan seorang diplomat muda Indonesia mencuri perhatian dunia dalam siding tersebut. Dalam siding tersebut terdapat enam Negara kepulauan yang ada di Pasifik yaitu Vanuatu, Solomon *Island*, Tonga, Nauru, marshall *Island*, dan Tuvalu yang secara terang-terangan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Papua. Pada forum PBB tersebut, Negara-negara kepulauan Pasifik itu menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan hasilnya sendiri.

Keberanian dan kepercayaan diri Indonesia dengan mengirimkan diplomat muda sanggup menjawab tudingan Negara-negara pendukung kemerdekaan Papua dengan tegas dan berani. Nara mengecam tudingan Negara-negara di kepulauan Pasifik yang mengkritik catatan HAM di Papua. Pernyataan enam kepala Negara itu dilihat Indonesia sebagai motif politik karena mereka tidak mengerti persoalan Papua dan kemudian mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka menggunakan Sidang Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah sosial dan politik di

dalam negerinya dan secara tidak langsung telah melakukan intervensi terhadap kedaulatan Negara Indonesia. Pernyataan enam kepala Negara tersebut dibuat untuk mendukung kelompok separatis yang selalu berusaha menciptakan rasa tidak aman di Papua. Selama ini Indonesia telah berusaha membendung internasionalisasi masalah Papua. Hal terakhir yang dilakukan adalah Indonesia berhasil membendung keanggotaan kelompok separatis kemerdekaan Papua menjadi *full member* di dalam forum *Melanesian Spearhead Group*, sementara perbaikan kualitas hidup di Papua terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo.

Adanya peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia bukan tanpa alasan, sebagaimana telah diketahui bahwa selama ini Indonesia menjadi bahan ejekan terkait isu-isu yang terjadi di Papua. Keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Mulai dari persamaan budaya dan kepemilikan jumlah ras Melanesia terbanyak di banding negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, letak geografis yang strategis, tingkat ekonomi Indonesia yang jauh lebih tinggi, serta pengalaman berpolitik Indonesia yang lebih mahir dari pada negara-negara di Pasifik Selatan, menjadikan hal-hal tersebut sebagai tolak ukur bagi Indonesia untuk mendapatkan status *full member* dalam forum *Melanesian Spearhead Group*. Dengan munculnya berbagai perlawanan dari para pendukung Papua Merdeka, bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh berperan di kawasan Pasifik Selatan. Kebijakan Indonesia untuk bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group* tentunya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang kemudian melihat lebih banyak keuntungan bagi Indonesia untuk terlibat kedalamnya. Dengan pengalaman berpolitik yang kuat di kawasan Asia Tenggara dan menjadikan ASEAN sebagai lingkaran konsentris politik luar negeri, maka Indonesia memiliki keinginan yang sama untuk memiliki pengaruh yang kuat di kawasan Pasifik Selatan. Dengan menjadi motor penggerak bagi negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, khususnya negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*, maka akan mempermudah Indonesia untuk merubah dukungan *Melanesian Spearhead Group* terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Papua.

Negara dianggap sebagai aktor rasional, meskipun kaum realis sebenarnya takut pada kesalahpahaman orang-orang dalam memandang negara sebagai rasional aktor. Aktor negara harus memaksimalkan segala sumber daya untuk memperkuat pertahanan dalam menyerang atau bertahan apabila berkonflik dengan negara lain. Dalam menggunakan *power* untuk mencapai Kepentingan Nasionalnya, aktor memiliki

beberapa metode pengaplikasian power yang digunakan sesuai dengan situasi yang diperlukan oleh aktor. Indonesia tidak menggunakan *hard power* untuk terlibat lebih dalam ke dalam Pasifik Selatan melalui militer, akan tetapi lebih menggunakan *soft power* melalui cara diplomasi. Yang pertama, adalah dalam berpolitik. Indonesia sebagai negara dengan *middle power* bisa menjadi agen perubahan di dunia internasional. Negara dengan *middle power* atau yang kekuatannya berada di level menengah, justru adalah negara yang bisa berkontribusi besar di dunia internasional. Melihat hal ini, Indonesia berada di posisi lebih tinggi dan memiliki potensi yang lebih untuk mempengaruhi Negara-negara lainnya di wilayah Pasifik Selatan. Kedua, melalui bidang ekonomi.

Seperti yang telah penulis katakan sebelumnya bahwa tingkat ekonomi Indonesia berada jauh lebih tinggi daripada Negara-negara anggota Melanesian seperti Papua Nugini, Fiji, Solomon Island, Vanuatu dan Caledonia Baru. Jika kita kaitkan dengan aktor rasional yang mempertimbangkan untung dan rugi, maka saat ini Indonesia belum mendapatkan keuntungan banyak dari segi ekonomi. Untuk itu, strategi Indonesia adalah dengan banyak memberi saat ini sehingga bisa banyak menuai hasil di kemudian hari. Ketiga adalah melalui budaya, dimana Indonesia memiliki jumlah ras Melanesia terbesar di wilayah Pasifik Selatan. Hal ini menjadikan Indonesia merasa pantas dan sudah seharusnya berada di dalam forum *Melanesian Spearhead Group*.

Untuk memberikan pengaruh yang kuat di wilayah Pasifik Selatan, maka Indonesia membutuhkan basis peran kepemimpinan yang kuat dan bervisi untuk dapat merangkul negara-negara di Pasifik Selatan untuk menjalin kerjasama, terutama negara anggota *Melanesian Spearhead Group*. Negara-negara tersebut tidak lagi dianggap rival, melainkan sebagai partner untuk kemajuan yang bisa menyumbangkan kemajuan bagi dinamika kawasan. Di sisi lain, Indonesia harus memperhatikan unsur ekonominya. Tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Mengingat bahwa adanya iuran wajib setiap negara anggota *Melanesian Spearhead Group* setiap tahunnya. Indonesia perlu lebih waspada akan adanya kemungkinan diperalat dalam hal ekonomi. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa diantara negara-negara anggota Melanesia, Vanuatu menjadi salah satu negara yang memiliki utang di dalam organisasi yang kemudian meminta bantuan negara lain yaitu Papua Nugini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini lah yang menjadi salah satu hal yang harus tetap di waspadai oleh Indonesia.

Dengan memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi Negara lainnya, Indonesia terus berusaha mendekati satu per satu Negara-negara di Pasifik Selatan untuk melihat Indonesia sebagai Negara yang memiliki andil besar bagi mereka. Kalkulasi untung dan rugi Indonesia terlibat di dalam *Melanesian Spearhead Group* bukan dengan gratis. Indonesia terus aktif didalam pertemuan-pertemuan Pasifik Selatan dan juga aktif dalam memberikan bantuan karena tentunya Indonesia ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Negara-negara tersebut. Karena Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menjadikan Kawasan Pasifik sebagai salah satu kawasan yang cukup penting. Berbagai program dan kerja sama juga harus sudah dirancang dan segera direalisasikan untuk membangun hubungan dengan Negara-negara anggota Menalesia. Terkait kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, Indonesia merasa perlu untuk menggalang dukungan yang lebih banyak dari dunia internasional. Mengingat bahwa Vanuatu sangat gencar mendukung dan menyuarakan kemerdekaan Papua, maka dengan keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* Indonesia ingin mnejadi negara yang berpengaruh sehingga menjadi salah satu cara untuk menggalang dukungan negara-negara Pasifik Selatan untuk meredam pergerakan ULMWP untuk memerdekakan Papua, sehingga Papua akan tetap menjadi harga mati di dalam wilayah Republik Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dengan semakin berkembangnya Indonesia, kebijakan politik luar negeri yang muncul juga semakin kompleks. Karena bagaimanapun juga dengan perubahan-perubahan kapabilitas Negara dan stabilitas politik dalam negeri memberikan pengaruh yang sangat besar demi tercapainya tujuan tersebut. Namun, terlihat jelas, tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, politik luar negeri Indonesia sekarang ini juga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang muncul dalam hubungan internasional. Berbagai isu-isu mengenai separatisme tidak hanya sekali disuarakan, namun isu tersebut sudah berlangsung sejak bergabungnya Papua ke dalam NKRI. Dal hal ini tidak hanya menjadi boomerang bagi Indonesia di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Bergabungnya Indonesia menjadi bagian dari *Melanesian Spearhead Group* terus mendapat halangan dari berbagai pihak yang tidak pro terhadap pembangunan, dimana pemerintah Indonesia di bawah pipinan Joko Widodo selalu dihadapkan dengan isu-isu mengenai pembantaian HAM di Papua. Hal ini kemudian membuat pemerintah

Indonesia berupaya untuk dengan cepat dan tepat namun secara terarah menangani isu-isu tersebut agar tidak merugikan Indonesia dalam berperan aktif di wilayah Pasifik Selatan. Dalam pembahasan tesis ini, jangkauan penelitian penulis fokuskan pada kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo.

Latar belakang hubungan kerjasama Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan didasari oleh kebutuhan dan kepentingan masing-masing tiap negara. Indonesia banyak memberi bantuan berupa kerjasama teknis seperti *capacity building* di bidang ekonomi dan *good governance* di bidang politik kepada negara-negara Pasifik Selatan (Fiji, Vanuatu, Papua Nugini), sebab negara-negara di Pasifik Selatan minim akan kemajuan pembangunan negaranya yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia yang kurang, demografi yang jumlahnya sedikit, serta akses yang sulit dijangkau. Adapun tujuan utama selain membantu pembangunan negara demi menjaga kestabilan kawasan, manfaat yang Indonesia dapatkan adalah meredam dukungan-dukungan ketiga negara tersebut dalam upaya kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Kesamaan etnis Melanesia yang membuat negara-negara di Pasifik Selatan yang dimana atas nama solidaritas mendukung penuh separatisme Papua Barat. Isu ini juga sudah menjadi isu internasional yang mengkhawatirkan Indonesia terhadap ancaman kedaulatan keutuhan NKRI.

Dukungan yang diberikan oleh beberapa negara anggota *Melanesian Spearhead Group* terhadap kelompok separatis Papua karena persamaan ras membuat Indonesia mengambil kebijakan *soft power* dengan upaya diplomasi menggunakan kerjasama teknik yang pada dasarnya diarahkan untuk mencapai sasaran seperti menjamin keutuhan NKRI. Indonesia sebagai aktor utama telah mengambil kebijakan secara rasional dengan memperhitungkan untung dan rugi atas keterlibatannya dengan *Melanesian Spearhead Group*. Indonesia melihat bahwa negara-negara di Pasifik Selatan memiliki potensi sumberdaya yang bisa dikembangkan. Sehingga saat ini melalui *soft power*, Indonesia masuk dengan *smooth* untuk menaburkan bantuan-bantuan yang akan di panen oleh Indonesia di masa mendatang.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sejauh ini membuahkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari ditolaknya permintaan ULMWP untuk menjadi *full member* dalam *Melanesian Spearhead Group*. Dukungan penuh dari Papua Nugini dan Fiji terhadap kedaulatan Indonesia menjadi pegangan utama bagi Indonesia untuk menaikan

statusnya menjadi full member. Penolakan terhadap ULMWP adalah karena mereka bukan sebuah negara, apapun alasannya mereka tidak punya hak untuk menjadi *full member* dengan pertimbangan sesuai prosedur ULMWP bukan wakil rakyat Papua secara keseluruhan. Keberadaan Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* ini juga akan menguntungkan dalam membangun hubungan diplomasi, terutama terkait isu Papua Merdeka. Adanya peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia di kanvas internasional menjadi hal yang menguntungkan bagi Indonesia untuk mengubah dukungan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* mengenai kedaulatan Indonesia terhadap Papua sebagai bagian dari NKRI. Pemerintah akan lebih mudah memberikan pemahaman bahwa Indonesia sangat peduli dengan masyarakat Melanesia, terutama yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemahaman ini tentu dilakukan dalam bentuk pembentukan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia telah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia di Papua dalam keadaan baik-baik saja, masyarakat menjalankan aktivitasnya secara normal dan kondusif. Roda pemerintahan dan intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun berjalan lancar. Sehingga ketika ada aksi masyarakat yang mengatasnamakan rakyat Papua ingin merdeka tentu perlu dipertanyakan, apakah benar itu sesuai dengan keinginan masyarakat disana. Untuk itu, terdapatnya Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di dunia terutama rakyat Melanesian bahwa Indonesia masih sangat mampu mengelola konflik rumah tangganya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adil, Hilman. 1993. *Dinamika Perkembangan Pasifik Selatan Dan Implikasinya Terhadap Indonesia*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan PDII-LIPI.
- Allison, Graham T.1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Bhakti, Ikrar Nusa. 2006. *Merajut Jaring-Jaring Kerja Sama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara*. Jakarta: LIPI
- Budiono Kusumohamidjojo. 1987. *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta
- Hatta, Mohammad, 1953. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta, Tintamas.
- Hatta, Mohammad. 1976. *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. Pertama
- Hery Saripuddin,dkk. *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan*. (2013). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia Dalam Diplomasi Indonesia*. Jakarta: P3K2 Aspasaf.
- Haris, Syamsuddin. 1989. *Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*. Jurnal Politik. Jakarta: PT Gramedia.
- Langie, Sam Jacob R. 1982. *Indonesia di Pasifik*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mochtar Kusumaatmadja,1983, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini (Kumpulan karangan dan Pidato)*”, Bandung: Penerbit Alumni
- Nasution, A.H. 1966. *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*. Jakarta: Mega Bookstore.
- Ogashiwa, Yoko. 2002. “*South Pacific Forum: Survival Under External Pressure*” in *New Regionalisms in the Global Political Economy*, by Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond (eds). London: Routledge.
- Renshon, J. & Renshon, S. 2008. *The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making, Political Psychology*, Alex Mintz & Karl DeRouden Jr.2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*
- Richard W Mansbach & Kristen L. Rafferty. 2012. “*Pengantar Politik Global (Introduction to Global Politics)*”. Bandung: Nusa Media.
- Usman, Asnani, 1994, *Indonesia dan Pasifik Selatan, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta: CSIS.
- Wuryandari, Ganewati, dkk. 2016. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2014. “*Jani-janji Jokowi-JK (Jika) Rakyat Tidak Sejahtera, Turunkan Saja Mereka!*”. Yogyakarta: Media Pressindo.

JURNAL

- Anshari, Yumna Sani. 2016. *Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan*. Makassar: Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Anwar, D.F. (2003). *Kew Aspects in Indonesia's Foreign Policy: Change and Continuity amidst a Changing Environment*. Indonesia: Foreign Policy and Domestic. Singapore: ISEAS.
- Bruce Russet dan Harvey Starr. 1998. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*.
- DeRouen, K. Mintz. A. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge University Press. New York.
- Diplomasi Indonesia 2014*. Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Elmslie, Jim. 2015. ‘*Indonesian Diplomatic Manuvering in Melanesia: Challenges and Opportunities*’ dalam Azizian, Rouben (eds.), *Regionalism, Security & Cooperation in Oceania*, Asia-Pacific Center for Security Studies, Honolulu.
- Habib, A Hasnan. 1990. *Kapita Selekta; Strategi dan Hubungan Internasional*. Jakarta: CSIS.
- Hard, I. 2007. *Breaking and Making International Norms: American Revionalisme and Crises of Legitimacy*. International Politic.
- J. Kusnanto Anggoro. 1987. *Dinamika Politik di Pasifik Barat Daya*, Analisa,Th, XVI, NO. 2.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2015*.
- Mac Queen, N., ‘*Sharpening the Spearhead: Sub regionalism in Melanesia*’, *Pacific Studies* Vol. 12 No.2.
- May, Ronald, *The Melanesian Spearhead Group: Testing Pacific Island Solidarity*, Australian Strategic Policy Institute.
- Michel, Leifer . 1983. *Indonesia's Foreign Policy*, London: Royal Institute For Internasional Affairs George Allen and Unwin.
- Nur Amaliyah, 2015, *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi*, Makassar: Universitas Hasanuddin
- Pujajnti, A. 2015. *Arah Hubungan Bilateral Indonesia – Malaysia di Masa Perintahan Jokowi*. Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi. Sekretariat Jenderal DPR PR. Jakarta.
- Singer, J. David, 1961. “*The Level-of-Analysis Problem in International Relations*”, *World Politics*, 14(1), the International System: Theoretical Essays.
- Wohlforth, William C., 2012. *Realism and Foreign policy*” dalam Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy, Theories, Actors, Cases*. Oxford.

York, Michael. “Selat Malaka Dalam Politik Luar Negeri Indonesia”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: MIHI.

Zonggonau, Lenie Marlina. 2011.. *Pembentukan Kerjasama Sub-Regional the Melanesian Spearhead Group Tahun 1988* Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

INTERNET

Arto Suryodipuro, “Building Relations with Pacific Islands Countries,” *The Jakarta Post* (daring), 25 January 2014,

<http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/25/building-relations-with-pacific-island-countries.html>

Forau, P. and T. Newton Cain, 2014, ‘Peter Forau on Why the Melanesian Spearhead Free West Papua Campaign, “Solomon Island & Vanuatu Supporting West Papua for Full Membership of the Melanesian Spearhead Group”, *Fre West Papua Campaign* (daring),

<https://www.freewestpapua.org/2016/05/12/solomon-islands-vanuatu-supporting-west-papua-for-full-membership-of-the-melanesian-spearhead-group-msg/>

Group is a Success’, *Devpolicy* (daring), 5 Maret, <devpolicy.org/peterforau-

<https://bennyw10.wordpress.com/2016/07/14/apa-itu-melanesia-spearhead-group-msg-dan-apa-saja-yang-dilakukan-msg/>

Mambor, Victor, “MSG Chair Said The MSG’s Principle is Decolonization of Melanesia”, *Tabloid Jubi* (daring), <http://tabloidjubi.com/eng/msg-chair-said-the-msgs-principle-is-decolonisation-of-melanesia>

Memperkuat Kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan

<http://m.antaranews.com/berita/552083/memperkuat-kehadiran-indonesia-di-pasifik-selatan>

Memperkuat Kemitraan dengan The Melanesian Spearhead Group.

<http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/219-4-articles-juli-2015/1928-memperkuat-kemitraan-dengan-the-melanesian-spearhead-group.html>

MSG: trading on political capital and Melanesian solidarity’, *Pacific Institute of Public Policy, Briefing Paper* 2(2008), 2,

<http://www.sastrapapua.com/2016/02/melanesia-sejarah-dan-politik-sebuah-7.html>

Pentingnya Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vanuatu.

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pentingnya-kerja-sama-ekonomi-indonesia-%E2%80%93-vanuatu>

Radio New Zealand, “Strong Fiji Backing for West Papua-Ro Teimumu” *Radio New Zealand* (daring), , <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/308573/strong-fiji-backing-for-west-papua-ro-teimumu>

SBY Kunjungi Fiji Untuk Jelaskan Kondisi Papua.

<http://www.voaindonesia.com/content/sby-kunjungi-fiji-untuk-jelaskan-kondisi-papua/1938483.htm>

Tarere, W., “Bainimarama has no problem with West Papua in MSG”, *Vanuatu Daily Post* (daring), <http://www.dailypost.vu/content/bainimarama-has-no-problem-west-papua-msg>

The Melanesian Spearhead Group. (2012). Annual Report 2012. Port Vila: MSG Secretariat. <http://www.msgsec.info/index.php/publicationsdocuments-a-downloads/annualreports?download=285%3A2012-annual-report> Dalam Munandar, Yusuf. Pentingnya Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Vanuatu. Jakarta: pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan